**PENGARUH EFISIENSI PELAYANAN PUBLIK TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI KELURAHAN BINCAR KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**Oleh:**

**Edi Epron Sihombing**

*Dosen, Fisipol Universitas Graha Nusantara*

*Email :* *ediepronsihombing1984@gmail.com*

***Abstrak***

Pegawai Kelurahan merupakan faktor pengaruh yang paling penting karena perilaku merekalah yang akan memperlancar atau merintangi tercapainya tujuan Kelurahan. Pegawai Kelurahan merupakan sumber daya yang langsung berhubungan dengan pengelolaan semua sumber daya yang ada di dalam Kelurahan terutama dalam menyelenggarakan pelayanan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat Kelurahan sebagai pengguna jasa. Pegawai Kelurahan Bincar merupakan modal utama di dalam Kelurahan yang akan berpengaruh besar terhadap efektivitas, karena walaupun teknologi yang digunakan merupakan teknologi yang canggih dan didukung oleh adanya struktur yang baik, namun tanpa adanya pegawai maka semua itu tidak ada gunanya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Efisiensi Pelayanan Publik (X) terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (Y) di Kelurahan Bincar Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan. Penelitian ini menggunakan teknik survei, sebagai bagian metode deskriptif kuantitatif untuk sejumlah informasi yang dikumpulkan berdasarkan padasuatu gejala yang terjadi pada saat penelitian dilaksanakan. Ditetapkan 12 responden yang diambil dari para Kepala lingkungan Kelurahan Bincar sebanyak 6 orang ditambah dengan pegawai Kelurahan Bincar sebanyak 6 orang.

Hipotesis yang diajukan diterima dengan kata lain terdapat Pengaruh Positif Pelayanan Publik (X) terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan Bincar Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan yang dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi Ŷ =1,461Y + 0,893 X. Koefisien korelasi yang menyatakan kekuatan Pengaruh Palayanan Publik (X) terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (Y) yang disimbolkan dengan rxy= 0,557 di interpretasikan sedang.Kontribusi Palayanan Publik (X) terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (Y) yang disimbolkan dengan r²xy= 0,310, artinya kontribusinya sedang yaitu 0,310 atau 31%, sedangkan kontribusi variabel lainnya yang berpengaruh tetapi tidak diteliti sebesar 69%.thitung = 2,95 > ttabel = 1,771,berati bahwa *signifikansi* Palayanan Publik (X) terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (Y) adalah signifikan.

**Kata Kunci** : *Pelayanan Publik, Efektivitas Kerja*

**I. Latar Belakang Penelitian**

Pegawai Kelurahan Bincar merupakan modal utama di dalam Kelurahan yang akan berpengaruh besar terhadap efektivitas, karena walaupun teknologi yang digunakan merupakan teknologi yang canggih dan didukung oleh adanya struktur yang baik, namun tanpa adanya pegawai maka semua itu tidak ada gunanya.

Efektivitas kerja pegawai Kelurahan Bincar dalam praktek pelayanan masyarakat *(public service)* dapat dinilai dengan menggunakan alat ukur berupa pertanyaan-pertanyaan seperti: apakah pegawai Kelurahan Bincar memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat yang terus berkembang? ; Seperti apa prestasi kerja pegawai Kelurahan Bincar?; Apakah masyarakat telah puas dengan penyelenggaraan pelayanan oleh pegawai Kelurahan Bincar?.

Dari semua alat ukur yang digunakan untuk memotret penyelenggaraan pelayanan masyarakat di Kelurahan Bincar, menunjukkan adanya kecenderungan belum maksimal penyelenggaraan pelayanannya sehingga dapat diduga efektivitas kerja pegawai Kelurahan Bincar belum efektif dan dapat menimbulkan *image* negatif dan ketidak percayaan warga terhadap pegawai Kelurahan Bincar.

Organisasi yang sukses adalah organi­sasi yang mampu menciptakan secara bersama-sama tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Efisiensi menunjukkan kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber daya dengan benar dan tidak ada pemborosan, dan sebaliknya efektivitas menunjukkan kemampuan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara tepat, sehingga antara efektivitas dan efisiensi itu saling terkait. Organisasi tidak hanya dituntut mengejar tujuan semata, akan tetapi bagaimana tujuan itu bisa dicapai dengan cara efisien.

Efisiensi pelayanan publik dapat dimaknai sebagai perbandingan antara *input* dan *output*. *Input* yang dimaksudkan di sini dapat berupa biaya, waktu, dan tenaga. Dari sisi *input,* pelayanan publik dikatakan efisien apabila pelayanan tersebut menggunakan sumber daya murah dan tidak boros. Dari sisi proses, agar dapat dikatakan efisien prosedur layanan publik harus bersifat sederhana sehingga warga tidak mengeluarkan banyak energi dan biaya dalam mengakses suatu layanan. Sedangkan dari sisi *output*, pelayanan publik dikatakan efisien apabila penggunaan sumber daya yang murah dan tidak boros tadi menghasilkan produk pelayanan yang sesuai dengan standar dan memuaskan pengguna layanan.

Efisiensi dalam pelayanan publik dapat dilihat dariperspektif pemberi layanan maupun pengguna layanan. Dari perspektif pemberi layanan, organisasi pemberi layanan harus mengusahakan agar harga pelayanan murah dan tidak terjadi pemborosan sumberdaya publik.Pelayanan publik sebaiknya melibatkan sedikit mungkin pegawai dandiberikan dalam waktu yang singkat. Demikian juga dari perspektif pengguna layanan, mereka menghendaki pelayanan publik dapat dicapai dengan biaya yang murah, waktu singkat, dan tidak banyak membuang energi.

Di dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik seringkali dijumpai adanya biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh warga pengguna untuk diberikan kepada pegawai Kelurahan Bincar agar dapat dilayani dengan cepat dan tidak bertele-tele. Hal ini menyebabkan harga pelayanan publik menjadi semakin mahal pada hal seharusnya sudah ada ketentuan harganya atau malahan gratis. Biaya tambahan tersebut sering di interpretasikan oleh pegawai Kelurahan sebagai ucapan terima kasih atas pelayanan yang telah mereka berikan.

Gejala efisiensi pelayanan publik juga nampak pada beberapa bidang pelayanan seperti pembuatan dan pembaharuan KTP, ijin mendirikan bangunan, ijin usaha bisnis, sertifikasi tanah, akte kelahiran dan retribusi ganda yang ditarik dari warga sehingga semuanya menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Fenomena seperti ini merebak di era otonomi daerah karena setiap daerah memiliki kecenderungan untuk berupaya meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah) dengan memungut dana dari masyarakat.

Efisiensi pelayanan publik adalah perbandingan terbaik antara *input* dan *output* pelayanan. Secara ideal, pelayanan akan efisien apabila pegawai pelayanan dapat menyediakan *input* pelayanan, seperti biaya murah dan waktu pelayanan cepat sehingga meringankan masyarakat pengguna jasa. Demikian pula pada sisi *output* pelayanan, pegawai pelayanan publik secara ideal harus dapat memberikan produk pelayanan yang berkualitas, terutama dari aspek biaya dan waktu pelayanan. Efisiensi pada sisi *input* dipergunakan untuk melihat seberapa jauh kemudahan akses publik terhadap sistem pelayanan yang ditawarkan.

Akses publik terhadap pelayanan dipandang efisien apabila publik memiliki jaminan atau kepastian menyangkut biaya pelayanan. Kepastian biaya pelayanan yang harus dikeluarkan oleh publik merupakan indikator penting untuk melihat intensitas korupsi dalam sistem layanan. Pegawai pelayanan publik yang korup akan ditandai oleh besarnya biaya ekstra yang harus dikeluarkan oleh pengguna jasa dalam mengakses layanan. Masyarakat Kelurahan Bincar, dengan demikian, harus mengeluarkan biaya ekstra untuk dapat memperoleh pelayanan yang terbaik dari pegawai pelayanan publik, padahal secara prinsip seharusnya pelayanan terbaik harus dapat dinikmati oleh publik secara keseluruhan.

**II. Tinjauan Pustaka**

* 1. **Hakikat Pemerintah dan Pemerintahan**
		1. **Pengertian Pemerintah**

Menurut pendapat C.F. Strong dalam Suradinata,pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, baik kedalam maupun keluar. Yang *pertama*, harus mempunyai kekuatan tentara atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang. *Kedua*, harus mempunyai kekuatan legislatif dalam arti membuat undang-undang dan *ketiga* harus mempunyai kekuatan finansial.

Pendapat lain disampaikan oleh Sayre dalam Suradinata, bahwa pemerintahan adalah lembaga negara yang terorganisir yang memperhatikan dan menjalankan kekuasaannya, tetapi tidak menyebutkan nama-nama kekuasaan atau kekuatan pada instansi tertentu.

* + 1. **Pengertian Pemerintahan**

Menurut Suradinata, pemerintahan adalah proses kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pandangan tentang pemerintahan tersebut sangat luas, karena semua aktifitas kegiatan negara digerakkan dalam rangka memberikan kesejahteraan dan rasa aman pada masyarakat. Proses tersebut melibatkan lembaga militer, kepolisian, fungsi legislatif, keuangan dan penegakan hukum yang berkeadilan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, menumbuh-kembangkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang pembangunan bagi kepentingan bangsa.

Sedangkan Rasyid berpendapat bahwa pemerintahan selalu dilihat sebagai perpaduan antara aturan main (konstitusi, hukum, etika), lembaga-lembaga yang berwenang mengelola serangkaian kekuasaan (eksekutif, legislatif, judikatif), serta sejumlah birokrat dan pejabat politik sebagai pelaku dari dan penanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan-kewenangan tersebut.

* 1. **Hakikat Efisiensi Pelayanan Publik**
		1. **Pengertian Efisiensi**

Kermally mengatakan bahwa:*“Effiency is doing the thing right whereaseffectivness is doing the right thing right”.* (Efisiensi adalah melakukan sesuatu dengan benar, sedangkan efektivitas adalah melakukan sesuatu yang benar).

Sedangkan menurut Drucker dalam Stoner, Freeman dan Gillbert, efisiensi adalah kemampuan untuk meminimalkan penggunaan sumbar daya dalam mencapai tujuan organisasi atau dengan kata lain yaitu melakukan sesuatu dengan tepat. Efisiensi adalah meminimalkan sumber daya, dana, sarana dan perasarana, untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu.

* + 1. **Pengertian pelayanan**

Menurut Kotler dalam Lukman, pelayanan adalah suatu kegiatan yang mengungtukan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada satu produk secara fisik.

Zein Badudu, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.

**2.2.3 Pengertian Efektivitas**

Cara menilai efektivitas kerja dapat dilakukan dengan empat kriteria, yaitu pencapaian tujuan, akuisisi sumberdaya, proses internal, dan kepuasan konstituensi (Kreitner dan Kinick dalam Sunyoto dan Burhanuddin), 2011, hal.7.

Druckerdalam Handoko, mengatakan bahwa efektifitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right thing*),sedangkan efesiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar (*doing thing right*).

**III. Kerangka Pemikiran**

Pelayanan Publik oleh pegawai pelayanan publik digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur seberapa jauh efektivitas kerja pegawai pelayanan publik dalam memberi pelayanan kepada publik, sehingga jika pelayanan kepada publik bisa lebih efisien, maka akan meningkat pula efektivitas kerja pegawai dalam melayani kebutuhan publik. Demikian juga sebaliknya, jika pelayanan publik tidak efesien, efektivitas kerja pegawai Kelurahan Bincar dalam menyelenggarakan publik juga akan menurun.

Melalui penelitian ini akan dapat diketahui secara obyektif bagaimana Pengaruh Efisiensi Pelayanan Publik terhadap efektivitas kerja pegawai Kelurahan Bincar Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan.

Dari uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan model kerangka pemikira dalam bentuk paradigma penelitian seperti di bawah ini.

**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

X

Y

Keterangan:

X = Pelayanan Publik

Y = Efektivitas Kerja Pegawai

**IV. Metode Penelitian**

**4.1. Bentuk Penelitian**

Penelitian ini menggunakan teknik survei, sebagai bagian metode deskriptif kuantitatif untuk sejumlah informasi yang dikumpulkan berdasarkan pada suatu gejala yang terjadi pada saat penelitian dilaksanakan. Usaha mendeskripsikan fakta-fakta yang diperoleh pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki, agar jelas keadaan atau kondisinya dan bersifat penemuan fakta-fakta seadanya *(fact finding)*. Penemuan gejala-gejala tersebut berarti juga menunjukkan distribusinya dan mengemukakan hubungannya satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki.

**4.2 Populasi dan Sampel**

Dalam penelitian ini, populasi target atau sasaran yaitu penduduk Kelurahan Bincar, yang terdiri dari masyarakat dan pegawai Kantor Kelurahan Bincar Kecamatan Padangsidimpuan Utara. Sedangkan populasi terjangkaunya adalah populasi yang telah homogen yaitu pegawai Kantor Kelurahan Bincar Kecamatan Padangsidimpuan Utara dan para Kepala lingkungan (Kepling) Kelurahan Bincar.

Berdasarkan uraian diatas diatas maka populasi harus di homogenkan lebih dahulu, yaitu terdiri para Kepala lingkungan Kelurahan Bincar yang terdiri dari 6 (enam) lingkungan yang diasumsikan telah homogen karena mereka adalah tokoh masyarakat yang mampu menilai dan mengkritisi jalannya pemerintahan Kelurahan Bincar dan juga berperan sebagai perpanjangan tangan dari kelurahan ke masyarakat dan perpanjangan tangan dari masyarakat ke Kelurahan Bincar, ditambah pegawai Kelurahan Bincar sebanyak 6 orang.

Agar hasilnya baik, berkualitas, dan valid, untuk penelitian ditetapkan 12 responden yang diambil dari para Kepala lingkungan Kelurahan Bincar sebanyak 6 orang ditambah dengan pegawai Kelurahan Bincar sebanyak 6 orang.

* 1. **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data sebagaimana telah disampaikan terdahulu, peneliti bekerja sama dan didampingi oleh staf Kelurahan Bincar. Sebelum kuesioner disebarkan, kepada para responden yang akan mengisi dijelaskan secara teknis pelaksanaan dan prosedur pengisian secara benar.

**4.4 Teknik Analisis Data**

Teknik untuk menganalisis data yang telah terkumpul dilakukan sebagai berikut :

1. Data ditabulasi dan dianalisis dengan menggunakan *statistik deskriptif* yaitu dengan mendeskripsikan data untuk masing-masing variabel secara parsial. Statistik deskriptif yang digunakan adalah *mean* (rata-rata hitung/ empirik), *median* (nilai tengah) dan *modus* (nilai yang fekuensinya lebih besar).
2. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan *statistik inferensial* untuk menguji hipotesis.
3. Untuk menguji linearitas pengaruh variabel (X) terhadap (Y), menggunakan persamaan regresi sederhana, dengan rumus : Ŷ= a + b X
4. Untuk menguji kekuatan pengaruh variabel (X) terhadap (Y), menggunakan koefisien korelasi *product moment dari Pearson* dengan rumus:



Dengan pengertian :

rxy : koefisien korelasi antara x dan y

N : Jumlah Subyek (responden)

X : Skor item

Y : Skor total

ΣX : Jumlah skor item

ΣY : Jumlah skor total

ΣX2 : Jumlah kuadrat skor item

ΣY2 : Jumlah kuadrat skor total

1. Untuk menguji besarnya pengaruh variabel (X) terhadap (Y), menggunakan koefisien determinasi dengan rumus kuadrat dari rxy yaitu r2xy atau dengan rumus KD = ( r2 ).

Untuk menguji signifikansi variabel (X) atas (Y) menggunakan pengujian t-hitung denganrumus : t $=\frac{Mx-My}{SDbM}$

Keterangan :

Mx : rata-rata dari sampel x

My : rata-rata dari sampel y

SDbM : standar kesalahan perbedaan rata-rata

**V. Hasil Penelitian**

Dari penelitian yang telah dilakukan, di mana data telah ditabulasi menjadi data mentah, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dan pengujian hipotesis, maka pada Bab V ini dapat ditarik beberapa kesimpulan penelitian dan saran-saran.

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Pertama, dari pengamatan lapangan dan dari data-data yang diperoleh di Kelurahan Bincar selama ini Pelayanan Publik terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan di Kelurahan Bincar sudah cukup baik.
2. Kedua, penelitian ini menemukan pengaruh Palayanan Publik (X) terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (Y) di Kelurahan Bincar yang dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi Ŷ =1,461Y + 0,893 X. Artinya bahwa setiap kenaikan 1 unit skor Pelayanan Publik (X) akan menyebabkan kenaikan 89,3 unit skor Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (Y) pada konstanta 146,1.
3. Ketiga, pengujian dengan koefisien korelasi yang menyatakan kekuatan Pengaruh Palayanan Publik (X) terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (Y) yang disimbolkan dengan rxy= 0,557 di interpretasikan sedang.
4. Keempat, pengujian koefisien determinasi menemukan kontribusi Palayanan Publik (X) terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (Y) yang disimbolkan dengan r²xy= 0,310, artinya kontribusinya sedang yaitu 0,310 atau 31%, sedangkan kontribusi variabel lainnya yang berpengaruh tetapi tidak diteliti sebesar 69%.
5. Kelima, thitung = 2,95> ttabel = 1,771,berati bahwa *signifikansi* Palayanan Publik (X) terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (Y) adalah signifikan.
6. Keenam, dengan demikian terdapat *Pengaruh*Positif Pelayanan Publik (X) terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (Y) adalah teruji benar.

**VI. Daftar Pustaka**

Atep Adya Barata. (2003). *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Arikunto Suharsimi, (2006), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Bina Aksara, Jakarta.

A.F. Stoner James, DKK, (1996), *Manajemen*, Edisi Bahasa Indonesia, PT. Prenhallindo, Jakarta.

Budiman Arief, (1997), *Teori Negara*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Ermaya, (2000), *Manajemen Pemerintahan*, PT.Vidcodata, Jakarta.

HadariNawawi, (2007) *Metode Penelitian Sosial*, Gajah Mada University Press.

Handoko, H,. (1997), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, BPFE,Yogyakarta.

Idrus Muhammad, (2009), *Metode Penelitian Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif,* edisi-2, Erlangga, Jakarta.

Kartini Kartono, (2006), *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, tentang Pedoman Umum. Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Lukiastuti dan Hamdani, (2013), *Manajemen Strategik Dalam Organisasi*, CAPS, Jakarta.

Lukman, (2001), *Konsep Aplikasi dalam: Perencanaan, Pengawasan, dan Pengambilan Keputusan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mahsun Mohammad, (2006), Pengukuran Kinerja Sektor Publik, BPFE Yogyakarta.

Moenir H.A.S, (2000), *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Nawawi Hadari, (2007), *Metode Penelitian Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Nugroho Riant dan Wrihatnolo, (2013), *Manajemen Perencanaan Pembangunan,* PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Panji Anoraga, (1998), *Dinamika Koperasi Bandung*: Penerbit Rineka Cipta.

Purwanto Iwan, (2007), *Manajemen Strategi*, CV. Yrama Widya. Bandung

Rasyid Ryaas, (1999), *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru*. Yasrif Watampone, Jakarta.

Rivai, Veithzal, (2008), *Kepemimpinan Dalam Sikap Perilaku Organisasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Robbins, Stephen P., (2003), *Perilaku Organisasi*, PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.

Rothwell, (1995), *Cytokines and the nervous system II: Action and Mechanism action*, Alliance Mortgage Co. V.

Soedarjat, (1993) *Kapital Selekta Manajemen Dan Kepemimpinan Serta Imlementasinya,* IND HILL, Jakarta.

*Sogiyono Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R dan D, Bandung Alfabeta.*

Steers Richard M., (1977), *Organizational effectiveness: a bihavioral view*. Goodyear Pub. Co.

Strong C.F., (1963), *A History of Modern Political Constitutions*. New York.

Sudirwo, (2002), Kurikulum dan Pembelajaran dalam Rangka Otonomi Daerah, CV. Andira, Bandung.

Suharsimi Arikunto, (2006), *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik,* Jakarta, Rineka Cipta.

Sulistiyani, (2004), *Memahami Good Governance: Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia,* Gava Medi, Jakarta.

Sunyoto, Danang dan Burhanuddin, (2013), *Perilaku Organisasi*, CAPS, Yogyakarta.

Suradinata Ermaya, (1998), *ManajemenPemerintahan: Otonomi Daerah,* CV Ramadan, Bandung.

Suradinata Ermaya, (2002), *Kepemimpinan Daerah dan Nasional Membangun Daerah Menuju Indonesia Bangkit*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Suradinata Ermaya, (2002), *Manajemen Pemerintahan Dalam Ilmu Pemerintahan* PT.Vidcodata, Jakarta.

Syafiie Inu Kencana, (2003) *Ilmu Pemerintahan,* MandarMaju, Bandung.

Syafiie Inu Kencanadkk, (2001), *Hukum Etika Pemerintahan*, Rineka Cipta,Jakarta.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Wibowo, (2007), *Manajemen Kinerja* : PT Raja Grafindo Persada.